

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas Utara serta kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, namun pelaksanaannya sering menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan pengguna jasa, lemahnya pengawasan, dan kurangnya sistem manajemen yang terintegrasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2011 belum optimal. Masih terdapat kendala dalam hal komunikasi kebijakan kepada pelaksana dan masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, sikap pelaksana yang kurang mendukung, serta birokrasi yang belum efisien. Meski demikian, retribusi parkir tetap memberikan kontribusi terhadap PAD, meskipun belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam aspek sosialisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efektivitas pemungutan retribusi parkir. Dalam peraturan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara No. 8 Tahun 2011 tentang retribusi tempat khusus parkir. Salah satunya retribusi daerah adalah sumber pendanaan yang sangat penting bagi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah khususnya di daerah padang lawas utara, sejalan dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang berasal dari retribusi daerah dari waktu ke waktu harus ditingkatkan

**Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, , Peraturan Daerah, Pendapatan Asli Daerah**

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2011 concerning Parking Retribution at the Transportation Agency of North Padang Lawas Regency and its contribution to increasing Regional Original Income (PAD). Parking retribution is one of the potential sources of regional income, but its implementation often faces various challenges such as low compliance of service users, weak supervision, and lack of an integrated management system. This study uses the theory of public policy implementation according to George C. Edwards III which includes four main variables: communication, resources, disposition (attitude of implementers), and bureaucratic structure. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2011 has not been optimal. There are still obstacles in terms of policy communication to implementers and the community, limited human resources and budget, and attitudes of implementers who are less support, and inefficient bureaucracy. However, parking levies still contribute to PAD, although not optimally. Therefore, improvements are needed in the aspects of policy socialization, increasing human resource capacity, and utilizing information technology to support transparency and effectiveness of parking levy collection. In the regional regulation of North Padang Lawas Regency No. 8 of 2011 concerning special parking lot levies. One of them is that regional levies are a very important source of funding for regions in the context of organizing government and regional development, especially in the North Padang Lawas area, in line with the objectives of regional autonomy, regional revenues from regional levies must be increased from time to time*

***Keywords: Policy Implementation, , Regional Regulation, Local Original Income***